

PERAN PASUKAN GABUNGAN GEMBONG SINGOYUDHO DALAM PERANG KEMERDEKAAN II DI BANJARNEGARA TAHUN 1948-1949

Oleh: Ardiyan F. Yudhistira, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

Abstrak

Perjuangan rakyat Indonesia belum benar-benar selesai pasca diproklamirkannya kemerdekaan. Belanda berniat kembali menguasai Indonesia terlebih setelah mereka mengadakan Agresi Militer I yang membuat wilayah Indonesia menyempit. Perundingan-perundingan yang diupayakan oleh pemerintah tidak kunjung memberikan titik terang. Pihak Indonesia dipaksa menerima keberadaan garis demarkasi. Garis demarkasi van Mook ini kemudian menyebabkan Banjarnegara berada dalam *status quo*, secara otomatis wilayah Banjarnegara menjadi batas dari wilayah Indonesia. Sebagai batas wilayah, Banjarnegara menjadi medan pertempuran sengit yang memperebutkan kekuasaan antara Belanda dengan Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keadaan Banjarnegara pada masa Agresi Militer II, proses pembentukan Pasukan Gembong Singoyudho, dan perannya dalam Perang Kemerdekaan II di Banjarnegara tahun 1948-1949. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama Perang Kemerdekaan II perlawanan yang dilakukan oleh Pasukan Gabungan Gembong Singoyudho membuat Belanda kewalahan dengan penghadangan-penghadangan dan serangan mendadak yang mereka lakukan. Selain mengancam kedudukan Belanda di Banjarnegara, Pasukan Gabungan Gembong Singoyudho banyak membantu jalannya roda pemerintahan selama berlangsungnya Pemerintah Darurat Militer dengan menjalankan Operasi Teritorial yang dilakukan dapat menumpas para kriminal yang meresahkan masyarakat. Keberadaan mereka juga mampu mengisi kekosongan kekuatan tempur akibat adanya dislokasi antar pasukan yang terjadi. Kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi dari pemerintah yang pada awalnya menipis akhirnya kembali menguat dan turut serta berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari gempuran Belanda.

Kata Kunci: *Banjarnegara, Gembong Singoyudho, Perang Kemerdekaan II.*

THE ROLE OF GEMBONG SINGOYUDHO COMBINED FORCES IN THE WAR OF INDEPENDENCE II AT BANJARNEGARA IN 1948-1949

Abstract

The struggle of the Indonesian people has not really finished after the proclamation of independence. The Dutch intended to regain control of Indonesia especially after they had held Military Aggression I which narrowed Indonesia's territory. The negotiations sought by the government did not provide a bright spot. The Indonesian side was forced to accept the existence of a demarcation line. The van Mook demarcation line then caused Banjarnegara to be in the *status quo*, automatically the Banjarnegara region became the boundary of the territory of Indonesia. As a regional boundary, Banjarnegara has become a fierce battleground for power between the Netherlands and Indonesia. The purpose of this study was to determine the state of Banjarnegara during the Military Aggression II, the process of forming the Gembong Singoyudho Forces, and its role in the War of Independence II at Banjarnegara in 1948-1949. The results of this study indicate that during the War of Independence II the resistance carried out by the Gembong Singoyudho Combined Forces made the Dutch overwhelmed with the obstacles and sudden attacks they carried out. In addition to threatening the Dutch position in Banjarnegara, the Joint Forces of Gembong Singoyudho helped the running of the government during the implementation of the Martial Law Government by carrying out the Territorial Operations which could crush the criminals who were disturbing the community. Their presence was also able to fill the vacuum of combat power due to dislocations between forces that occurred. Public trust in the existence of the government which was initially thinned out finally regained strength and participated in the struggle to maintain independence from the onslaught of the Dutch.

Keywords: Banjarnegara, Gembong Singoyudho, War of Independence II.

I. Pendahuluan

Proklamasi Kemerdekaan telah melahirkan konflik fundamental antara Indonesia dengan Belanda karena kedua belah negara masing-masing memiliki pandangan yang berbeda. Perbedaan pandangan bersumber dari kepentingan yang bertolak belakang. Indonesia menganggap dirinya telah merdeka dan berdaulat penuh atas wilayahnya, sedangkan Belanda masih berpegang teguh atas kekuasaannya sebagai penjajah.¹ Belanda pernah dua kali mengadakan serangan terang-terangan dengan skala besar kepada Indonesia. Belanda menyebut serangan-serangan itu sebagai Aksi Polisionil Pertama dan Kedua,² sedangkan kita lebih mengenalnya sebagai Agresi Militer Belanda Pertama dan Kedua. Secara

keseluruhan dari Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sampai pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 dapat disebut sebagai periode Perang Kemerdekaan Indonesia. Pada saat Perang Kemerdekaan II antara tahun 1948 sampai 1949 di Indonesia berlaku pemerintahan militer atas instruksi Markas Besar Komando Djawa (MBKD) No. 1 tanggal 20 Desember 1948, Peraturan Pemerintah No. 70 dan instruksi Panglima Besar Angkatan Perang (PBAD).³ Peraturan ini dalam prakteknya adalah pemerintah yang didukung oleh rakyat. Dalam lingkungan pemerintahan tersebut, tenaga-tenaga militer memberi bantuan kepada rakyat begitu pula sebaliknya rakyat juga membantu keamanan dan kesejahteraan militer.⁴

Selama berlangsungnya Perang Kemerdekaan II Indonesia terpaksa harus mengakui Garis Demarkasi van Mook, garis ini adalah sebuah garis khayal yang

¹Tahi Bonar Simatupang, *Arti Sejarah Perjuangan Kemerdekaan*, (Jakarta: Idayu, 1981), hlm. 61.

²Taufik Abdullah, "PDRI, Kesadaran Sejarah dan Masa Kini", *Jurnal sejarah: pemikiran, rekonstruksi, persepsi*, Perjuangan yang Tak Kunjung Usai Vol. 13 No. 13 oleh Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007), hlm. 18.

³Abdul Haris Nasution, *Pokok-Pokok Gerilya*. (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 133-136.

⁴Saleh A. Djamhari, *Markas Besar Komando Djawa (1948-1949)*, (Jakarta: Lembaga Sejarah Hankam, 1967), hlm. 14.

dibuat oleh H. J. van Mook sebagai garis perbatasan antara wilayah Belanda dengan wilayah Republik. Garis demarkasi ini adalah batas terakhir posisi pasukan Belanda hasil dari Agresi Militer Belanda I pada 28 Agustus 1947. Daerah-daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah diluar 8 karesidenan, dan Jawa Timur bukan lagi wilayah Republik. Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di luar wilayah Republik harus ditarik ke dalam, sehingga terjadi perpindahan massal.

Pelaksanaan hasil Perundingan Renville mengalami kemacetan, saat ketegangan semakin memuncak Belanda kemudian mengumumkan bahwa mereka tidak terikat lagi pada hasil Perjanjian Renville. Pada tanggal 19 Desember 1948 terjadi Agresi Militer Belanda II, sebagai daerah perbatasan Banjarnegara mendapatkan dampak langsung dari peristiwa ini.⁵ Muncul perlawanan kepada pihak Belanda yang merupakan usaha rakyat dalam mempertahankan wilayah Republik. Perlawanan tersebut

dikomandoi oleh pasukan yang dibentuk dari pasukan Komando Distrik Militer (KDM) Banjarnegara yang kemudian diberi nama Pasukan Gabungan Gembong Singoyudho yang terdiri atas gabungan beberapa rakyat, pemuda, dan TNI.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian secara historis. Metode historis merupakan salah satu penyelidikan mengaplikasikan metode pemecahan yang ilmiah dari perspektif historis suatu masalah. “Secara lebih rinci metode sejarah didefinisikan sebagai seperangkat asas dan bantuan yang sistematis didesain guna membantu secara efektif untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis dan menyajikan sintesis hasil-hasil yang dicapainya, yang pada umumnya dalam bentuk tertulis”.⁶ Jadi, “metode sejarah adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi dan penyajian sejarah”.⁷ Metode penelitian

⁵Makhlani Yudhokusumo, *Banjarnegara Berjuang, Kilasan Sejarah Perjuangan Merebut Kemerdekaan di Kabupaten Banjarnegara*, (Banjarnegara: FKPPi Banjarnegara, 1988), hlm. 209.

⁶Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 27.

⁷Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 44.

sejarah kritis terdiri dari empat tahap penelitian, yaitu:

1. Heuristik (Pencarian Sumber)

Heuristik merupakan kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah.⁸ Dilihat dari sifatnya sumber sejarah dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang berasal dari para saksi mata atau tangan pertama yang mengalami dan menyaksikan peristiwa sejarah secara langsung. Sumber primer yang digunakan penulis yaitu:

Arsip Salian Surat Perintah Pembentukan Seksi Gabungan Komando Distrik Banjarnegara Selatan Bat, I.M.B/VIII.

Arsip Kodam Diponegoro, Keadaan Banyumas pada Revolusi 17 Agustus 1945/d 1948, satu Bendel.

Arsip Salian Surat Perintah Harian 29 – 3 – 1949 SWKS IC, Banjarnegara: Kodim Banjarnegara.

Arsip Salian Surat Perintah Harian 3 – 4 – 1949 SWKS IC, Banjarnegara: Kodim Banjarnegara.

Sumber sekunder adalah sumber yang bukan berasal dari saksi mata (tangan kedua), yaitu seseorang yang tidak menyaksikan peristiwa sejarah secara langsung.⁹ Sumber sekunder yang digunakan dalam antara lain:

Abdul Haris Nasution, *Pokok-Pokok Gerilya*, Bandung: Angkasa, 1980.

Adisarwono Mertadiwangsa, *Banjarnegara: Sejarah dan Budayanya objek Wisata dan Seni Budayanya*, Banjarnegara: Pemda Kabupaten Banjarnegara, 2011.

Makhlani Yudhokusumo, *Banjarnegara Berjuang, Kilasan Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Kabupaten Banjarnegara*, Banjarnegara: FKPPi Banjarnegara, 1988.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Verifikasi merupakan suatu pengujian sumber dan menganalisis secara kritis mengenai keautentikan sumber-sumber yang telah

⁸Helius Syamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 67.

⁹Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982), hlm. 35.

dikumpulkan. “Verifikasi itu ada dua macam: autentisitas, atau keaslian sumber atau kritik eksternal, dan kredibilitas, atau kebiasaan dipercayai atau kritik intern”.¹⁰ Kritik eksternal adalah kritik sumber yang dilakukan untuk memperoleh sumber yang memiliki nilai keaslian yang tinggi. Kritik Intern merupakan kritik dari dalam untuk menilai isi atau validasi data yang terdapat dalam sumber, sehingga mendapatkan kredibilitas dokumen.

3. Interpretasi (Penafsiran)

Interpretasi adalah menafsirkan atau memberikan makna pada fakta sejarah, yang merupakan bagian dari keseluruhan proses penelitian sejarah.¹¹ Fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh harus dihubungkan satu sama lain, sehingga antara fakta yang satu dengan yang lain menunjukkan kecocokan. Tahap ini bertujuan untuk mengungkapkan kondisi Banjarnegara pada masa Perang Kemerdekaan II tahun 1948.

¹⁰Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 77.

¹¹Daliman, *op.cit.*, hlm. 81.

4. Historiografi (Penulisan)

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penulisan sejarah, pada tahap ini penulis akan menyampaikan hasil penelitian yang telah lengkap, diuji, dan diinterpretasi melalui tulisan. Tahapan menulis sejarah merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan untuk memahami sejarah. Dalam tahapan ini, sejarawan dituntut untuk mengeluarkan seluruh ide mengenai pengetahuan sejarahnya dengan tidak hanya mengandalkan keterampilannya dalam penggunaan kutipan, namun dengan mengandalkan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya.

1. Kondisi Banjarnegara Sebelum Agresi Militer Belanda II

Berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, maka Jepang mulai mengatur pemerintahan pendudukan militer di Pulau Jawa yang sifatnya sementara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Pasal 1, sesuai dari undang-undang tersebut jabatan gubernur jenderal seperti pada masa Hindia Belanda telah dihapuskan dan segala kekuasaan sekarang berada di tangan panglima tentara Jepang di Jawa. Pada bulan Agustus tahun 1944 situasi angkatan perang Jepang semakin memburuk,

keadaan ini tampak dari moral masyarakat yang mulai merosot, produksi perangnya semakin mundur sehingga persediaan senjata dan amunisi berkurang.¹²

Titik balik kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya terjadi setelah pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat berhasil menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Pengeboman terhadap kedua kota tersebut mengakibatkan jatuhnya korban yang jumlah mencapai ribuan jiwa, sehingga Jepang terdesak karena mengalami kehancuran total. Tanggal 14 Agustus 1945 berselang lima hari setelah pengeboman, Jepang resmi menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Menyerahnya Jepang kepada Sekutu menciptakan keadaan *Vacuum of Power* (kekosongan kekuasaan) di seluruh Asia Tenggara termasuk Indonesia, situasi ini menimbulkan perselisihan antara golongan tua dengan golongan muda yang disebabkan oleh perbedaan pendapat tentang kapan dan bagaimana Proklamasi Kemerdekaan dilakukan. Perbedaan

pendapat antara kedua golongan berujung dengan pengasingan Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Sukarno-Hatta baru dilepaskan setelah adanya kesepakatan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan pada keesokan harinya antara Ahmad Subarjo dengan golongan muda. Upacara pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Proklamasi Kemerdekaan ini menjadi satu babak baru dalam perjalanan bangsa Indonesia.

2. Faktor Pembentukan Pasukan Gabungan Gembong Singoyudho

Perundingan Renville ditandatangani yang pada tanggal 17 Januari 1948 tidak jauh berberbeda dari hasil perundingan sebelumnya, Indonesia kembali menjadi pihak yang dirugikan. Penandatanganan perjanjian tersebut membuat wilayah Indonesia menjadi semakin sempit, karena harus mengakui daerah yang sudah diduduki Belanda hasil dari agresinya. Melaksanakan Perjanjian Renville, berarti harus melaksanakan Garis Demarkasi van Mook. Garis batas ini ditentukan berdasarkan hasil dari agresi sebelum penetapan gendang senjata yang dikeluarkan DK PBB. Batas wilayah

¹²Cahyo Budi Utomo, *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*, (Semarang: IKIP Press, 1995), hlm. 205.

Belanda membentang dari Sumatera Selatan, Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sampai wilayah Jawa Timur. Jadi wilayah dari Republik hanya sebatas 8 karesidenan di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Banten dan sebagian Sumatera. Selain dari daerah-daerah tersebut, pasukan yang ada harus ditarik ke wilayah Republik. Wilayah Jawa Tengah, di daerah Banyumas garis demarkasi berada di barat Banjarnegara, yang membentang dari Gombang terus ke utara sampai kaki Gunung Slamet lalu ketimur dan berakhir di Dieng.¹³

Wilayah Banjarnegara masuk kedalam *status quo* terbagi menjadi dua yaitu yang masuk kedalam wilayah Belanda dan yang masuk kedalam wilayah Republik. Daerah yang berada di sebelah barat Desa Joho menjadi bagian dari wilayah kantong Belanda sedangkan yang berada di timur merupakan wilayah Republik. Dalam segi pemerintahan Banjarnegara juga menjadi pusat pemerintahan Karesidenan Banyumas

yang terpaksa harus ditarik ke wilayah Republik. Seperti pada hasil Perundingan Linggarjati, pelaksanaan hasil Perundingan Renville mengalami kemacetan. Indonesia tetap tegas mempertahankan kedaulatan Indonesia, sementara Belanda terus berupaya menjatuhkan wibawa Indonesia. Saat ketegangan semakin memuncak, menjelang tengah malam pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda mengumumkan bahwa mereka tidak terikat lagi pada hasil Perjanjian *Renville*.

Pada tanggal 19 Desember 1948 tentara Belanda secara serentak bergerak menyerbu kedudukan Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta, dan wilayah lain yang masih menjadi bagian dari republik. Belanda bermaksud untuk menguasai Yogyakarta, yang menjadi ibu kota Republik Indonesia. Pesawat Belanda membombardir Lapangan Terbang Maguwo dan sejumlah bangunan penting di Yogyakarta, aksi ini mengawali Agresi Militer Belanda II.¹⁴ Pada Agresi Militer

¹³Ex Anggota Be. XVII Tentara Pelajar Cie Purwokerto, *Sejarah Perjuangan Tentara Purwokerto*. (Jakarta: Yayasan Mastepe, 1979), hal. 86-87.

¹⁴Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* Edisi Pemutakhiran, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 258.

Belanda II, pasukan bantuan Belanda dari wilayah kantong berusaha menyerbu ke ibu kota. Tentara Belanda menyerang Banjarnegara hampir bersamaan dengan pendudukannya di Yogyakarta. Serbuan pertama tentara Belanda terjadi pada pagi hari 19 Desember 1948 menggempur melalui udara, mereka menghujani tembakan mitraliur dan membombardir Solo sampai Banjarnegara.¹⁵ Belanda menuju Banjarnegara melalui dua arah yaitu arah barat dan arah utara. Dari daerah utara tentara Belanda yang bergerak melalui Tegal terus ke timur hingga sampai ke Pekalongan dan Wonosobo. Sedangkan dari arah barat adalah pasukan yang bergerak melalui Tegal, Bumiayu, Ajibarang dan Purwokerto kemudian dilanjutkan ke arah Banjarnegara.

Wilayah Banjarnegara terbelah menjadi dua oleh Sungai Serayu menjadikan Banjarnegara secara otomatis terbentuk menjadi dua sektor kawasan gerilya, yaitu sebelah utara dan selatan

¹⁵Adisarwono Mertadiwangsa, *Banjarnegara: Sejarah dan Budayanya objek Wisata dan Seni Budayanya*, (Banjarnegara: Pemda Kabupaten Banjarnegara, 2011), hlm. 186.

Sungai Serayu. Guna membantu selama pemerintahan darurat tetap berjalan dalam pelaksanaan Perang Rakyat Semesta¹⁶, TNI kemudian menyusun unsur teritorial pemerintahan militer dalam bentuk Komando Distrik Militer (KDM). Pemerintahan militer dibentuk dengan tujuan untuk menjaga eksistensi dari pemerintahan RI, serta membantu jalannya pemerintahan sipil yang terkendala karena agresi dari Belanda.

Setelah peyerbuan dari Tentara Belanda, Republik dalam keadaan bahaya atau *Staat van Oorlog en Beleg* (SOB) kemudian berlakulah Pemerintah Darurat Militer. Fungsi dari Pemerintah Darurat Militer adalah membantu jalannya pemerintahan sipil terus berjalan dan tetap dapat melakukan perlawanan kepada Belanda. Pada tingkat kabupaten dibawah naungan KDM, untuk tiap kecamatan berada dibawah PMKT (Pemerintahan Militer KeTjamatan) dan KODM (Komando Onder Distrik Militer) sesuai dengan rencana dan penempatan personil segera menempati posisi masing-masing. Bupati Sumitro selama berlakunya

¹⁶Abdul Haris Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 2A: Kenangan Masa Gerilya*, (Jakarta: Haji Masagung, 1983), hlm. 112.

Pemerintah Darurat Militer menjalankan roda pemerintahannya di daerah gunung dan selama masa ini dia juga diangkat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah. Sedangkan untuk wilayah bekas Recomba seperti Purwanegara, Mandiraja, Purwareja Klampok, dan Susukan yang terhimpun kedalam Kawedanan Purwareja Klampok mengalami penanganan berbeda karena banyaknya pengaruh dari Pemerintahan Recomba Belanda selama dua tahun.¹⁷

Batalyon Hartoyo yang ditempatkan di antara Banjarnegara dan Wonosobo, memiliki tugas pokok untuk pelaksanaan perang gerilya dalam wilayah Kabupaten Banjarnegara dengan empat kompi pasukannya, tiga kompi di sebelah utara dan satu kompi di sebelah selatan. Pasukan tempur yang berintikan Batalyon I dipimpin langsung oleh Mayor Hartoyo berada di utara bersama Kompi Umar Said dan Kompi Partowo, sedangkan Kompi Yasir ditugaskan di sepanjang selatan Sungai Serayu dari Tunggoro ke Barat sampai Piasa di Susukan.¹⁸

¹⁷Makhlani, *op.cit.*, hlm. 212.

¹⁸Nurdiyanto, *Banjarnegara pada Masa Perang Kemerdekaan (1945-1949)*, Patra – Widya, Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan

Situasi berubah ketika Belanda berhasil menduduki Banjarnegara. Pasukan Kompi Umar Said di sebelah Utara mengalami perubahan besar dimana satu seksi atau peleton beserta dengan komandannya Letda Sutrisno bergerak menuju ke Majenang Cilacap dan mengadakan pergerakan terpisah dari kompiunya, kebanyakan dari anak buah Letda Sutrisno berasal wilayah tersebut dan mereka ingin berjuang di daerah sendiri dimana mereka sangat mengenal medan serta masyarakat. Sedangkan sisa lainnya yang terdiri dari putra-putra asli Banjarnegara memilih untuk memisahkan diri ke sebelah selatan Sungai Serayu, tepatnya di sepanjang jalan Tunggoro. Kompi Yasir yang berada di wilayah Kretek dan Sapuran Wonosobo kemudian sesuai tugas mulanya bergerak untuk menguasai sebelah Selatan Banjarnegara, namun mereka justru melaju lebih jauh ke arah barat di sepanjang jalan Kroya, Maos, Wangon, dan sekitarnya yang merupakan asal wilayah dari sebagian besar dari anggota pasukan tersebut. Praktis di sebelah selatan Sungai Serayu tanpa pasukan tempur yang menguasai

Budaya Vol. 6 No. 1, (Jakarta: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 2005), hlm. 32.

daerah tersebut, hanya ada Pasukan Hisbullah yang dipimpin oleh Arifin dengan kekuatan tidak lebih dari satu regu.¹⁹

Mayor Sunardi Perwira KDM dan Kapten S. Taram Kepala Staf menyadari adanya kekosongan di sebelah selatan Sungai Serayu, yang hanya menyisakan anggota dari Kompi Umar Said tanpa pemimpin masih bertahan di desa-desa sepanjang selatan Serayu. Keduanya berinisiatif untuk menghimpun pasukan ini dalam sebuah kesatuan baru, kemudian mereka mendengar laporan Letda Makhiani sedang berada di Dusun Mentasari, Wonosobo. Letda Makhiani dulu merupakan anggota Batalyon IV Banjarnegara, namun setelah reorganisasi dan rasionalisasi dipindahkan menjadi anggota Inspektorat Persenjataan Staf Khusus Angkatan Darat (AD) di Yogyakarta. Menjelang terjadinya Agresi Militer Belanda II, Letda Makhiani dipindahkan ke menjadi anggota persenjataan Staf MBKD dengan tugas untuk mendirikan Pos X MBKD di Banyumas apabila Belanda berhasil menduduki ibu kota, sebagai pos penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Keberadaan Letda Makhiani di

Dusun Mentasari merupakan bagian tugas tersebut, selama perjalanan Letda Makhiani menderita sakit dan kelelahan beristirahat di sana yang kebetulan terdapat Dokter Tentara Letkol Sutrisno.

Letda Makhiani dipanggil untuk diberi tugas mengkoordinasi dan memimpin Seksi Gabungan KDM Banjarnegara yang anggotanya adalah kawan-kawan perjuangan di Batalyon IV Banjarnegara. Para anggotanya terdiri dari putra daerah yang terpisah dari kesatuannya, sehingga Seksi Gabungan ini autentik dari Banjarnegara.

3. Keterlibatan Pasukan Gabungan Gembong Singoyudho Dalam Perang Kemerdekaan II

Pada tanggal 2 Februari 1949 seksi gabungan yang menamakan dirinya sebagai Pasukan Gabungan Gembong Singoyudho, atau yang lebih sering disebut Pasukan Gembong telah terbentuk. Berdasarkan Surat Perintah Siasat KDM Banjarnegara No. 19/I/49/Wk tertanggal 1 Februari 1949. Pemberian nama ini disebabkan oleh Letda Makhiani selaku pemimpin pasukan memiliki nama samaran "Gembong".²⁰ Tugas utama dari

¹⁹Makhiani, *op.cit.*, hlm. 204.

²⁰*Ibid.*, hlm. 219

pasukan ini adalah mengisi kekosongan di bagian Selatan Banjarnegara, yang sebelumnya ditempati oleh Kompi Yasir dan pasukannya. Wilayah operasionalnya meliputi Tunggoro di timur sampai Piasa Susukan di sebelah barat.

Tindakan pertama yang dilakukan oleh Pasukan Gabungan Gembong Singoyudho mendatangi semua desa di Kecamatan Banjarnegara dan Sigaluh, untuk menjelaskan pada semua kepala desa dan perangkatnya bahwa Pemerintahan Republik masih ada dan pemerintahan darurat sedang diselenggarakan oleh KODM dibantu staf para camat. Pasukan Gabungan Gembong Singoyudho yang terdiri dari 4 regu, Regu E. Affandie, Regu Kusmin, Regu Sumarco, dan Regu Djasrowi. Masing-masing regu terdiri atas 8 atau 9 orang personil, komandan seksi juga dibantu oleh Sersan Slamet Hardjosaputro sebagai sersan pleton dan ahli senjata, juga oleh dua orang penghubung atau kurir.²¹

Tanggal 6 Februari 1949 Pasukan Gabungan Gembong Singoyudho melakukan penghadangan terhadap konvoi Belanda di jalan besar yang menghubungkan Banjarnegara dengan

Wonosobo. Pasukan terbagi dalam posisi berbanjar dengan urutan dua pengawas di depan, disusul oleh Regu E. Affandie, Komandan Pasukan, Regu Kusmin, Regu Sumarco dan Regu Djasrowi berada di paling belakang. Mendekati jalan besar rombongan menyebar dalam tiga regu, seluruh pasukan diperintahkan untuk menempati *stelling*²² agar dapat terlindung dari tembakan dan kontak secara langsung dengan musuh. Terdapat tiga kendaraan iring-iringan yang hendak melintas, terdiri dari sebuah Jeep, satu Power Wagon, dan Truk 2½ T. Penghadangan ini mengakibatkan lima korban jiwa terdiri dari seorang perwira Komandan Distrik bersama pengawal serta supir mobil Jeep, dua orang di dalam mobil PW, sepuluh orang luka-luka, dan lainnya yang berhasil selamat lari ke barat.²³ Sedangkan dari sisi Pasukan Gembong Singoyudho seluruhnya berhasil selamat, tidak satupun jatuh korban tewas maupun luka.

Kerugian yang diterima atas aksi penghadangan memicu reaksi dari pihak Belanda. Pagi harinya mereka

²²Tan Malaka, *Gerpolek (Gerilya Politik Ekonomi)*, (Yogyakarta: Diandra, 2012), hlm. 69.

²¹*Ibid.*, hlm. 221.

²³Makhlani, *op.cit.*, hlm. 224.

mengirimkan dua pesawat P51 (Mustang) dari arah berlawanan, satu pesawat datang dari timur dan pesawat lainnya datang dari barat kemudian melakukan penembakan di sepanjang jalan. Belanda juga selanjutnya melakukan serangan darat yang mengakibatkan kerugian sebanyak 50 rumah habis terbakar, belum lagi jatuhnya korban jiwa tidak kurang dari dua puluh dua orang yang tidak sempat menghindari ketika sedang berada di sawah dan ladang mereka semua ditembak mati.²⁴ Korban jiwa berasal dari beberapa desa yang dilintasi oleh Tentara Belanda.

Pada tanggal 8 Februari Pasukan Gabungan Gembong Singoyudho melaksanakan Operasi Teritorial untuk kecamatan-kecamatan lain, terutama di wilayah barat Banjarnegara diantaranya Kecamatan Bawang, Purwanegara, Mandiraja, Purwareja Klampok, dan Susukan. Pada wilayah ini dikenal memiliki tingkat kriminalitas tinggi, tingginya kriminalitas disebabkan oleh kelompok yang sering berbuat onar dan melakukan tindakan pencurian, kelompok ini dikenal dengan nama Bengseng Suci yang dipimpin oleh Suhadi.²⁵ Pada tanggal

16 Februari 1949, satu minggu Pasukan Gabungan Gembong Singoyudho melakukan Operasi Teritorial di Kecamatan Purwanegara hasil yang dicapai dirasa sudah cukup maka mereka kemudian bergerak ke barat menuju Kecamatan Mandiraja. Situasi di Kecamatan Mandiraja yang sudah tertata rapi, berbeda jauh dengan kecamatan sebelum-sebelumnya membuat Operasi Teritorial di wilayah ini berjalan dengan mudah.

Pada tanggal 9 Maret 1949 kembali diadakan penghadangan di lereng jalan besar Prigi Banjarnegara – Wonosobo. Susunan pasukan masih tetap sama yang terdiri dari empat seksi atau regu hanya saja tiap regunya sekarang bertambah besar dengan penggabungan tambahan anggota yang menyusul. Tiap regunya terdiri atas 15 sampai 16 orang anggota, kelompok staf 5 orang, seluruhnya 76 pasukan ditambah dengan KODM Sigaluh 5 orang, sehingga total ada 84 orang yang terlibat dalam aksi penghadangan kali ini.²⁶ Penghadangan berhasil merusak

²⁴*Ibid.*, hlm. 226.

²⁵Alie Humaedi, “Gaboengan Romusha Ngamoek: Pertarungan

Kekerasan di Kaki Pegunungan Dieng Banjarnegara, tahun 1942-1957”, Jurnal LIPI, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm. 18.

²⁶Makhlani, *op.cit.*, hlm. 238.

tujuh kendaraan dan melukai beberapa penumpangnya beberapa Tentara Belanda ada mengalami luka ringan dan berat terkena ledakan granat. Pertempuran yang terjadi tidak berlangsung lama ini berakhir setelah satu persatu regu dari Pasukan Gabungan Gembong Singoyudho menarik diri ke arah selatan jalan kemudian menuju ke timur kembali ke Desa Pringamba.

Pergolakan yang terjadi di daerah-daerah akibat Agresi Militer Belanda II melalui Perang Kemerdekaan yang dilakukan oleh pasukan TNI beserta segenap rakyat semakin mendesak posisi Belanda. Desakan dari dunia internasional melalui PBB berhasil memaksa Belanda untuk menyelesaikan permasalahan melalui meja perundingan. Pada tanggal 14 April 1949 diadakan Perundingan Roem-Royen di Jakarta, dinamika Perundingan Roem-Royen yang diselenggarakan dari tanggal 14 April sampai tanggal 7 Mei 1949 berkembang dengan baik. Perundingan ini menghasilkan keputusan yang menguntungkan bagi RI diantaranya pembebasan para tokoh pemimpin negara yang menjadi tawanan, pengosongan Ibu Kota Yogyakarta dari Tentara dan Pemerintahan Belanda mulai tanggal 25

Juni sampai 29 Juni 1949 disusul kota-kota yang lain di seluruh wilayah RI. Perundingan Roem-Royen juga disusul dengan pengumuman gencatan senjata oleh kedua belah pihak pada tanggal 3 Agustus 1949 yang berlaku untuk Pulau Jawa, Madura, Bali dan sekitarnya mulai 11 Agustus 1949, sedangkan untuk wilayah lain berlaku mulai 15 Agustus 1949.²⁷

Berlakunya gencatan senjata antara RI dengan Belanda yang mulai tanggal 11 Agustus 1949, Pasukan Gabungan Gembong Singoyudho pun tidak lagi melakukan aksi. Pasukan yang terbentuk atas perintah dari Komandan KDM Banjarnegara, yang kemudian diangkat menjadi Seksi II SWKS IC Kompi Yasir telah selesai menjalankan tugasnya. Pada tanggal 5 Agustus 1949 Komandan Pasukan Gabungan Gembong Singoyudho Letda Makhiani menghadap Kapten Yasir, untuk menyerahkan kembali seksi dan sekaligus berpamitan kepada Komandan Kompi SKWS IC.²⁸ Setelah menyelesaikan tugasnya untuk menghimpun dan memimpin pasukan,

²⁷Merle Calvin Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1991), hlm. 349.

²⁸Makhiani, *op.cit.*, hlm. 303.

Letda Makhiani akan kembali berdinasi sebagai Staf Persenjataan MBKD. Penyerahan anggota seksi pada kompi dan kembalinya Letda Makhiani pada MBKD menjadi akhir riwayat dari Pasukan Gabungan Gembong Singoyudho, pasukan autentik dari KDM Banjarnegara.

III. Kesimpulan

Pada Perang Kemerdekaan adalah suatu wujud manifestasi konflik yang dilakukan secara fisik lewat pertempuran maupun non fisik dengan diplomasi, dengan tujuan untuk mendapatkan atau memperebutkan suatu kekuasaan dengan keadaan bebas dan independen. Tujuan dari dari perang kemerdekaan ini adalah mengupayakan penetapan kemerdekaan yang sebenarnya dan seutuhnya untuk bangsa Indonesia, sehingga tidak ada lagi penjajahan diatas bumi Indonesia. Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten di Karesidenan Banyumas yang menjadi batas *status quo* sejak berlakunya garis Demarkasi van Mook, terbagi antara wilayah republik dengan kekuasaan Belanda hasil Agresi Militer I. Kondisi geografisnya yang dikelilingi pegunungan dan lembah menjadi tempat ideal untuk

melakukan gerilya, sehingga pada masa Pemerintah Darurat Militer pasca Agresi Militer Belanda II di daerah ini banyak terjadi pertempuran antara TNI dengan Tentara Belanda.

Selama Perang Kemerdekaan II daerah operasi dibagi atas wilayah utara dan selatan Sungai Serayu, namun karena terjadi disorganisasi antar pasukan menyebabkan terjadinya kekosongan pasukan di wilayah selatan beberapa anggota pasukan terutama mereka yang berasal dari Banjarnegara terpisah dari kesatuannya. KDM Banjarnegara kemudian membentuk sebuah seksi khusus untuk menghimpun para pasukan ini. Letda Makhiani kemudian ditugaskan memimpin pasukan yang sering disebut sebagai Pasukan Gabungan Gembong Singoyudho. Tugas utama dari pasukan ini adalah mengisi kekosongan di bagian Selatan Banjarnegara, yang dilakukan dengan cara melakukan perang gerilya melawan Tentara Belanda dengan penyerangan, penyergapan, dan penghadangan. Selain itu Pasukan Gabungan Gembong Singoyudho juga, mendapatkan tanggung jawab untuk melangsungkan tindakan-tindakan yang dirasa perlu untuk menjaga keamanan wilayah. Tindakan yang dilakukan ini

untuk mengatasi ancaman perusuh dan perampok yang meresahkan rakyat serta membantu jalannya Pemerintahan Militer Darurat Militer dan memulihkan wibawa Pemerintah Republik.

Pasukan Gabungan Gembong Singoyudho beberapa kali berhasil merepotkan kedudukan Tentara Belanda di Banjarnegara dengan aksi penghadangan di beberapa titik seperti di Bandingan dan Prigi, serta penyerangan terhadap Kawedanan Purwareja Klampok

dan Pos Anjing NICA di Susukan. Berkat aksi-aksi ini Pasukan Gabungan Gembong Singoyudho kemudian ditarik menjadi bagian dari Seksi II SWKS IC dibawah pimpinan Kompi Yasir sampai berakhirnya proses diplomasi antara Republik dengan Belanda. Genjatan senjata antara kedua pihak kemudian menjadi penanda akhir dari perjalanan mereka dalam periode Perang Kemerdekaan II di Banjarengara.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

Abdul Haris Nasution, *Pokok-Pokok Gerilya*, Bandung: Angkasa, 1980.

_____, *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 2A: Kenangan Masa Gerilya*, Jakarta: Haji Masagung, 1983.

Adisarwono Mertadiwangsa, *Banjarnegara: Sejarah dan Budayanya objek Wisata dan Seni Budayanya*, Banjarnegara: Pemda Kabupaten Banjarnegara 2011.

Cahyo Budi Utomo, *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*, Semarang: IKIP Press, 1995.

Ex Anggota Be. XVII Tentara Pelajar Cie Purwokerto. *Sejarah Perjuangan*

Tentara Purwokerto, Jakarta: Yayasan Mastepe, 1979

Makhlani Yudhokusumo, *Banjarnegara Berjuang, Kilasan Sejarah Perjuangan Merebut Kemerdekaan di Kabupaten Banjarnegara*, Banjarnegara: FKPPI Banjarnegara, 1988.

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Edisi Pemutakhiran, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.

Ricklefs, Merle Calvin, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1991.

Saleh A. Djamhari, *Markas Besar Komando Djawa (1948-1949)*, Jakarta: Lembaga Sejarah Hankam, 1967.

Tahi Bonar Simatupang, *Arti Sejarah Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta: Idayu, 1981.

Tan Malaka, *Gerpolek (Gerilya Politik Ekonomi)*, Yogyakarta: Diandra, 2012.

Nurdiyanto, "Banjarnegara Pada Masa Perang Kemerdekaan 1945-1949", *Patra – Widya*, Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Vol. 6 No. 1, Jakarta: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 2005.

Jurnal:

Alie Humaedi, "Gaboengan Romusha Ngamoek: Pertarungan Kekerasan di Kaki Pegunungan Dieng Banjarnegara, tahun 1942-1957", *Jurnal LIPI*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Taufik Abdullah, "PDRI, Kesadaran Sejarah dan Masa Kini", *Jurnal sejarah: pemikiran, rekonstruksi, persepsi*, Perjuangan yang Tak Kunjung Usai Vol. 13 No. 13 oleh Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007

Pembimbing,

Yogyakarta, 22 November 2018

Reviewer,



Danar Widiyanta, M.Hum
NIP. 19681010 199403 1 001



Dina Dwi Kurniarini, M.Hum
NIP. 19571209 198702 2 001

